



Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan dan Lantamal

Keputusan DPRD Terhadap LKPi-AMJ Bupati Pontianak

MEMPAWAH. Menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-Akhir Masa Jabatan (LKPi-AMJ) Bupati Pontianak Periode 2009-2014, Jumat (15/11) pagi, DPRD Kabupaten Pontianak menyampaikan 15 rekomendasi. Diantaranya menindaklanjuti pembangunan Pelabuhan Regional dan Lantamal Kuala Mempawah.

"LKPi-AMJ merupakan ringkasan laporan dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Sebagaimana amanat PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 23 ayat 5, Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam paripurna istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," jelas Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria SH MH saat membuka sidang paripurna di Gedung DPRD.

Sedangkan Juru Bicara (Jubir) DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto SE, ME dalam sidang

paripurna tersebut membacakan 15 rekomendasi terhadap LKPi-AMJ Bupati Pontianak periode 2009-2014, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 12 Tahun 2013. "Terhadap Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, berkaitan dengan aset pemerintah daerah di kawasan Pelabuhan Regional dan Lantamal Kuala Mempawah yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Direkomendasikan, agar bupati melakukan tindak lanjut terhadap pembangunan tersebut, agar aset yang ada dapat bermanfaat dengan baik," kata Susanto.

Kemudian, lanjut Legislator PDI Perjuangan itu, masih adanya temuan BPK pada tahun 2012 lalu di Dinas PU berkaitan dengan pekerjaan proyek. Bukan itu saja, DPRD juga menyoroti minimnya kualitas pengawasan proyek, hingga menyebabkan kualitas pekerjaan tidak maksimal. Serta berkaitan dengan terbatasnya SDM yang tidak berkembang den-

gan beban kerja yang tinggi, hingga mengakibatkan timbulnya kendala dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan tidak tersedianya data base tentang jalan di Kabupaten Pontianak. "Kami sarankan agar segera menindaklanjuti temuan BPK. Berikutnya, lakukan revisi regulasi aturan tentang jasa pengawasan, menambah jumlah PNS di PU, serta memprogramkan pembuatan data base jalan di Kabupaten Pontianak untuk mendukung perencanaan program pembangunan, sarannya.

Selanjutnya, imbuah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu, DPRD juga menilai permasalahan status aset di Kabupaten Kubu Raya (KKR) menjadi kendala mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Disarankan, agar aset tersebut dilepaskan saja. "Kami juga mendapati banyaknya aset kendaraan yang sering macet dan sudah tua, serta keberadaan aset yang tidak memiliki plang nama. Disarankan agar aset kend-

araan macet dan tua dilelang, agar tidak menjadi beban anggaran pemeliharaan. Serta membuat plang nama di setiap aset yang ada, tuturnya.

Rekomendasi berikutnya, yakni berkaitan dengan kinerja PDAM Mempawah, DPRD menilai kinerja Mutu dan kualitas pelayanan air bersih yang diberikan perusahaan daerah itu belum maksimal. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar bupati melakukan evaluasi kerja. Jika tidak berhasil, maka pengelolaan PDAM sebaiknya diserahkan kepada swasta. "Sedangkan di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (P3K), kami sarankan agar bantuan sapi kepada petani dihibahkan. Agar tidak menjadi beban bagi petani itu sendiri. Selain, nilai bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan waktu dan tenaga pemeliharaan ternak," pendapatnya.

Serta, DPRD menyoal kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pontianak di masa mendatang. (fa)

Sungai Mempawah. Serta, adanya beberapa lokasi pantai di Kabupaten Pontianak yang mengalami erosi cukup parah. Hendaknya, bupati dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penanaman mangrove di lokasi pantai yang mengalami erosi. "Kami menyarankan agar bupati membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil di Kabupaten Pontianak. Serta, disarankan agar bupati menambah jumlah PNS di Inspektorat Daerah dan menerapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan kesalahan, tujuannya.

Usai dibacakan, keputusan DPRD itu kemudian diserahkan oleh Ketua DPRD, H Rahmad Satria kepada Bupati Pontianak, H Rita Norsan. Diharapkan, keputusan dan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, demi perbaikan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak di masa mendatang. (fa)